

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai analisis *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. *Stakeholders* yang ikut serta dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, berikut adalah penjabaran dari masing-masing karakteristik para *stakeholders*.

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DPPPA)

DPPPA Kota Semarang memiliki karakteristik untuk menolak KDRT serta memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Terlibat langsung melalui pembuatan peraturan, program sosialisasi, dan membentuk UPTD PPA. Memiliki tingkat pengaruh yang tinggi karena program bertujuan langsung untuk mencegah KDRT di Kota Semarang. Upaya yang telah dilakukan oleh DPPPA Kota Semarang adalah ikut merumuskan Perda No 5 tahun 2016, membentuk PPTK dan JPPPA, serta melakukan sosialisasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

2) Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki karakteristik untuk menolak KDRT, namun kewenangan hanya terbatas di lingkungan sekolah saja. Terlibat dengan menargetkan Sekolah Ramah Anak, tingkat pengaruh sedang. Upaya yang telah dilakukan adalah menjalankan Sekolah Ramah Anak serta melakukan sosialisasi anti perundungan bagi siswa/I TK, SD, dan SMP. Memiliki sarana RDRM yang didalamnya terdapat psikolog dan psikiater.

3) Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang menyatakan telah menolak praktik KDRT di Kota Semarang, namun kewenangan yang dimiliki hanya membantu membuat laporan sosial apabila terjadi kasus kekerasan. Tidak terdapat upaya untuk melakukan pencegahan KDRT di Kota Semarang.

4) Tim Penggerak PKK Kota Semarang

Tim Penggerak PKK Kota Semarang memiliki karakteristik untuk menolak KDRT. Kewenangan yang dimiliki berupa peningkatan kapasitas para kader PKK, melakukan program PARED yang didalamnya terdapat sosialisasi KDRT kepada masyarakat. Tidak memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan. Upaya yang telah dilakukan adalah mengencarkan program PARED di setiap Kelurahan.

5) Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS)

YKKS memiliki karakteristik untuk menolak KDRT, namun kewenangan yang dimiliki hanya seputar 6 JPPA yang didampingi oleh YKKS. Tidak memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan. Tingkat pengaruh sedang karena dapat membantu melalui JPPA saja. Upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 6 JPPA yang didampingi, melaksanakan program pola asuh keluarga yang dapat membantu mengurangi kekerasan di dalam lingkungan keluarga.

6) Masyarakat Kota Semarang

Karakteristik yang dimiliki adalah menolak KDRT, kewenangan yang dimiliki adalah memberikan pengaruh kepada lingkungan di sekitar. Sarana yang dimiliki adalah sosial media. Upaya yang telah dilakukan adalah mengikuti kegiatan anti KDRT, melaksanakan diskusi dengan lingkungan di sekitarnya.

4.1.2. Dalam menjalankan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang masih terdapat berbagai faktor yang menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menjabarkan kesimpulan mengenai faktor penghambat dengan acuan dari teori Sudarmo sebagai berikut:

1) Budaya Organisasi

Faktor budaya organisasi, yaitu budaya yang kaku atau terlalu berpedoman dengan peraturan, menghambat kolaborasi Dinas Sosial

Kota Semarang dengan *stakeholders* lainnya. Keterbatasan dari Dinas Sosialis menyebabkan sedikitnya keterlibatan Dinas Sosial untuk memberikan aksi, terobosan serta inovasi dalam mengatasi KDRT di Kota Semarang.

2) Sistem Kerjasama

Faktor sistem kerjasama, yaitu adanya sistem vertikal atau hierarkis antar *stakeholders* yang terlalu mengandalkan arahan dari DPPPA Kota Semarang. Keterbatasan ini menyebabkan adanya keterlambatan untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang.

3) Kepentingan *Stakeholders*

Faktor kepentingan *stakeholders*, yaitu adanya perbedaan persepsi dan semangat dari *stakeholders* yang tidak terlalu memprioritaskan pencegahan KDRT di Kota Semarang. Keterbatasan ini menyebabkan kurang optimalnya perilaku *stakeholders* untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang.

4) Budaya Patriarki

Faktor budaya patriarkis, yaitu adanya budaya yang menempatkan laki-laki diatas perempuan di dalam semua aspek, ditemukan menghambat kolaborasi para *stakeholder* untuk melaksanakan program pencegahan KDRT di Kota Semarang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti masih menemukan bahwa terdapat beberapa *stakeholders* yang dapat meningkatkan karakteristik yang dimilikinya. Maka saran yang dapat penulis sampaikan agar karakteristik yang dimiliki oleh para *stakeholders* dapat mengatasi masalah KDRT di Kota Semarang untuk berjalan lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan karakteristik sarana dan prasarana Tim Penggerak PKK Kota Semarang serta Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata dalam mengatasi masalah KDRT, masih belum memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan aksi pencegahan KDRT di Kota Semarang, sehingga peneliti dapat menyarankan kedua *stakeholders* untuk dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya agar dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan.
2. Sebagai *stakeholder* yang digolongkan berpotensi untuk mendukung KDRT, penulis dapat memberikan saran bagi Dinas Sosial untuk menciptakan program pencegahan KDRT, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesenjangan di dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan KDRT, atau mensosialisasikan pelaporan kasus-kasus KDRT. Pelaksanaan program dapat melibatkan *stakeholder* lainnya untuk ikut mencegah KDRT di Kota Semarang.

3. Dalam rangka mengatasi permasalahan sistem kerjasama yang terlalu mengandalkan DPPPA Kota Semarang, penulis dapat menyarankan bagi DPPPA Kota Semarang untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, melalui diskusi terbuka, pertemuan konsultasi dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, sehingga keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan bersama.
4. Pencegahan KDRT di Kota Semarang juga terhambat dikarenakan komitmen dan semangat yang dimiliki oleh beberapa pihak masih belum optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan keterlibatan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*, sehingga peneliti dapat memberikan saran bagi DPPPA Kota Semarang sebagai *stakeholder* utama untuk menguatkan komitmen yang dimiliki dengan *stakeholders* lainnya. DPPPA Kota Semarang dapat menyediakan pelatihan rutin bagi para *stakeholders* terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pencegahan KDRT di Kota Semarang sehingga dapat meningkatkan kemampuan *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan rasa kepedulian *stakeholders* untuk mengatasi masalah KDRT di Kota Semarang.
5. Dalam rangka mengatasi masalah budaya patriarki yang masih ada di dalam masyarakat, peneliti menyarankan bagi para *stakeholder* untuk membentuk program berbasis kesetaraan dan keadilan gender untuk

masyarakat. Program dibentuk dengan *output* membangun rasa saling menghargai antara laki-laki dan perempuan.